

IMPLEMENTASI SISTEM PENOMORAN RUMAH TERINTEGRASI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA BULO

Ali Mu'min¹⁾, Maqvira Azzahra Arfandi²⁾, Amilia Putri³⁾, Muh. Rafli Maulana⁴⁾,
Ainun Vhadila Karim⁵⁾, Muhammad Iqram⁶⁾, Nur Lailatul Qadriani⁷⁾, Arwin⁸⁾,
Muhammad Nasri Katman⁹⁾, Roby Aditya¹⁰⁾

1)-10) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-Mail:

90100122033@uin-alauddin.ac.id

Submitted:
20-04-2026
Accepted:
23-06-2026
Published:
24-06-2026

ABSTRAK

Administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Namun, pada banyak wilayah pedesaan, data kependudukan masih belum sepenuhnya terhubung dengan identitas spasial tempat tinggal, sehingga menghambat proses verifikasi data dan pelayanan administratif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem penomoran rumah sebagai bentuk integrasi data kependudukan berbasis lokasi di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, pendataan rumah warga, verifikasi data kependudukan, perancangan sistem penomoran, serta pemasangan papan identitas rumah secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh rumah sasaran berhasil diberikan nomor identitas yang terstruktur dan sesuai dengan data administrasi desa. Implementasi ini meningkatkan efisiensi proses pendataan, mempercepat verifikasi data penduduk, serta memperkuat akurasi layanan administrasi desa. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian, sistem penomoran rumah terbukti efektif sebagai instrumen dasar dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis data di tingkat desa.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Penomoran Rumah; Pelayanan Publik; Desa; Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Accurate and integrated population administration is a fundamental element in improving the quality of public services at the village level. However, in many rural areas, population data is not fully connected to spatial residential identity, which limits the efficiency of data verification and administrative services. This community service program aims to implement a house numbering system as a form of location-based population data integration in Bulo Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The implementation methods include field observation, household data collection, population data verification, system design of house numbering, and direct installation of house identification boards. The results indicate that all target houses successfully received structured identification numbers aligned with village administrative records. This implementation improves data collection efficiency, accelerates population data verification, and strengthens the accuracy of village administrative services. In

Corresponding Author:
Ali Mu'min

addition, community awareness regarding orderly population administration has increased. Therefore, the house numbering system is proven effective as a foundational instrument in supporting data-driven transformation of public services at the village level.

Keywords: *Population Administration; House Numbering; Public Service; Village; Community Service*

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan berkualitas. Data kependudukan yang akurat, terbaru, dan dikelola dengan baik menjadi dasar dalam berbagai proses pelayanan publik, mulai dari pendataan penduduk, penyusunan program pembangunan, hingga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran (Ramadhani et al., 2024). Dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa, ketersediaan data yang valid tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai landasan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sistem administrasi kependudukan menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Insyira & Purnamasari, 2024).

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola data kependudukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi (Sarman et al., 2025). Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan administrasi kependudukan berkaitan pada data penduduk dengan lokasi tempat tinggal masyarakat (Mayasiana et al., 2024). Pelayanan administrasi yang masih dilakukan secara manual sering kali menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi yang mampu menghubungkan data penduduk dengan lokasi tempat tinggal menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Prabowo et al., 2024).

Sistem identifikasi rumah merupakan salah satu bentuk pendukung administrasi daerah yang berfungsi sebagai penanda fisik tempat tinggal. Penerapan nomer rumah yang terstruktur dapat memudahkan proses pendataan penduduk, layanan pos, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga penanganan keadaan darurat (Ali & Saputra, 2020). Selain itu, identifikasi rumah yang jelas juga dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pemetaan wilayah dan pengelolaan data masyarakat secara lebih sistematis. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, integrasi antara data kependudukan dan identitas lokasi tempat tinggal menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif (Zahroh et al., 2026).

Meskipun demikian, masih banyak desa yang belum terintegrasi dengan data kependudukan. Ketersediaan data Kartu Keluarga (KK) dan data penduduk belum sepenuhnya mampu mendukung pelayanan administrasi apabila belum disertai dengan identitas rumah yang jelas (Mokalu et al., 2022). Akibatnya, proses verifikasi data masyarakat, pemetaan wilayah, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah sering kali memerlukan waktu yang lebih lama dan bergantung pada pengetahuan aparat desa terhadap kondisi di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem administrasi desa tidak hanya memerlukan ketersediaan data penduduk, tetapi juga membutuhkan sistem identifikasi wilayah yang mampu menghubungkan data tersebut dengan lokasi tempat tinggal penduduk (Riko & Marcus, 2023).

Perkembangan tata kelola berbasis data mendorong pentingnya penguatan sistem administrasi pada tingkat yang paling dasar, yaitu tingkat rumah tangga (Yusika Riendy, Asip Suyadi, 2022). Pentingnya data yang lengkap, valid, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan ditekankan oleh berbagai program digitalisasi desa dan inisiatif desa pintar. Namun, pengembangan sistem informasi yang baik tidak akan berjalan optimal apabila identifikasi objek dasar berupa rumah tinggal belum tersedia secara jelas. Oleh karena itu,

penyediaan identitas rumah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mendorong peningkatan sistem administrasi kependudukan berbasis data (Mardinata et al., 2023).

Melihat situasi tersebut, diperlukan suatu upaya yang dapat mendukung penguatan administrasi kependudukan melalui penyediaan sistem identifikasi rumah yang terstruktur dan mudah diterapkan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui Penomoran Identifikasi Rumah Terpadu Desa. Program ini dibuat untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan rumah warga, verifikasi data kependudukan, penyusunan sistem penomoran rumah, serta pemasangan nomer identitas pada setiap rumah warga. Dengan adanya identitas rumah dengan data kependudukan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola informasi masyarakat secara lebih tertib, akurat, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Program yang dilaksanakan berupa penomoran rumah warga yang bertujuan untuk mendukung administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. Koordinasi awal dan observasi
Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan wawancara dengan pemerintah Desa Bulo untuk memperoleh informasi mengenai kondisi administrasi kependudukan desa. Selain itu, dilakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi rumah warga dan ketersediaan data Kartu Keluarga (KK).
2. Pendataan dan verifikasi data kependudukan
Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data rumah warga yang berasal dari dokumen administrasi desa dan data Kartu Keluarga. Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data kependudukan dengan kondisi dan letak rumah.
3. Penyusunan identifikasi rumah
Pada tahap ini dilakukan penyusunan format penomoran rumah berdasarkan wilayah dusun dan urutan rumah yang ada di Desa Bulo dengan target sebanyak 100 papan nomer. Sistem penomoran dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat dan aparat desa serta dapat digunakan sebagai identitas rumah yang terhubung dengan data kependudukan.
4. Pemasangan nomer rumah
Nomer rumah yang telah dibuat dipasang pada rumah warga sesuai dengan data yang telah diverifikasi sebelumnya.
5. Monitoring dan evaluasi program
Monitoring dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara nomer rumah yang telah dipasang dengan data kependudukan yang dimiliki pemerintah desa. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan aparat desa serta masyarakat untuk mengetahui manfaat program yang telah dilaksanakan (Fkun et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi Program kerja Penomoran di Kantor Desa Bulo.

Desa Bulu, yang terletak di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang telah memiliki data kependudukan masyarakat melalui dokumen Kartu Keluarga (KK) dan administrasi desa lainnya. Namun, berdasarkan hasil observasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, ditemukan bahwa data tersebut belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem identifikasi rumah yang terstruktur. Sebagian rumah warga belum memiliki nomer identitas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan administrasi desa. Situasi ini menyebabkan aparat desa mengalami keterbatasan dalam menghubungkan data kependudukan dengan lokasi tempat tinggal warga secara cepat dan akurat. Selain itu, tidak adanya identitas rumah juga berpotensi menghambat efektivitas pelayanan administrasi, pendataan penduduk, serta pelaksanaan program-program pemerintah yang membutuhkan data lokasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan program dimulai dengan proses pendataan dan verifikasi data rumah warga berdasarkan dokumen administrasi desa. Tim pengabdian bersama aparat desa melakukan pencocokan data kepala keluarga dengan lokasi rumah yang ditempati untuk memastikan keakuratan informasi. Hasil verifikasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan sistem penomeran rumah yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Desa Bulu. Sistem identifikasi yang diterapkan memuat informasi nama kepala keluarga, nama panggilan, nomer rumah, RT/RW, identitas desa, serta identitas pelaksana program. Penyusunan format identitas rumah dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pembacaan, ketahanan media.



Gambar 2. Foto desain dan hasil cetak nomer rumah

Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian melakukan proses desain dan produksi papan identitas rumah. Papan identitas dibuat menggunakan bahan yang cukup kuat untuk penggunaan jangka panjang serta didesain dengan tampilan yang informatif dan mudah dikenali masyarakat. Setiap papan identitas memuat nomer rumah dan nama lengkap serta nama panggilan masing-masing warga sehingga dapat berfungsi sebagai penanda setiap rumah. Hasil produksi menunjukkan bahwa seluruh papan identitas berhasil dicetak sesuai data yang telah diverifikasi dan siap untuk dipasang pada rumah warga.



Gambar 3. Foto pemasangan nomer rumah pada rumah warga

Tahap berikutnya adalah pemasangan papan identitas pada rumah warga. Pemasangan dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian dengan melibatkan masyarakat setempat agar

lokasi pemasangan sesuai dengan kondisi rumah masing-masing. Penempatan nomer rumah dilakukan pada bagian depan rumah yang mudah terlihat dari jalan sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai identitas lokasi.



Gambar 4. Evaluasi dengan aparat desa Bulu

Program ini berhasil mencapai tujuan utama yaitu tersedianya sistem identifikasi rumah yang terstruktur dan terintegrasi dengan data kependudukan desa. Keberhasilan program diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu jumlah rumah yang berhasil didata dan diverifikasi, jumlah papan identitas yang berhasil diproduksi, jumlah rumah yang telah dipasang nomer identitas, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh rumah yang menjadi sasaran program berhasil memperoleh nomer identitas sesuai dengan data administrasi yang dimiliki pemerintah desa. Selain itu, aparat desa menyatakan bahwa keberadaan nomer rumah mempermudah proses pencarian alamat warga, verifikasi data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan administrasi yang membutuhkan informasi lokasi penduduk secara cepat dan akurat.

Dari sisi perubahan sosial, program ini memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan. Sebelum program dilaksanakan, sebagian masyarakat menganggap nomer rumah hanya sebagai penanda fisik bangunan. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan pemasangan identitas rumah, masyarakat mulai memahami bahwa nomer rumah memiliki fungsi yang lebih luas sebagai bagian dari sistem administrasi desa yang dapat mendukung pelayanan publik dan pendataan penduduk. Perubahan sikap ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya integrasi data kependudukan dengan identitas tempat tinggal.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah proses verifikasi data rumah yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, beberapa rumah memiliki kondisi bangunan yang berbeda sehingga diperlukan penyesuaian lokasi pemasangan agar nomer rumah dapat terlihat dengan jelas dan tidak mudah rusak. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi terbaru mengingat adanya kemungkinan perpindahan penduduk atau perubahan kepemilikan rumah.

KESIMPULAN

Program penomeran rumah telah berhasil dilaksanakan sebagai upaya mendukung tertib administrasi kependudukan melalui penyusunan dan pemasangan identitas rumah yang terintegrasi dengan data kependudukan masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan proses koordinasi, pendataan, verifikasi data, penyusunan penomeran rumah, hingga pemasangan papan identitas pada rumah warga. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa program mampu menghasilkan sistem identifikasi rumah yang lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pendataan, pencarian alamat, dan pengelolaan administrasi oleh pemerintah desa.

Keberhasilan program ditunjukkan oleh tercapainya target pemasangan nomer rumah pada seluruh rumah sasaran serta meningkatnya kemudahan aparat desa dalam menghubungkan data kependudukan dengan lokasi tempat tinggal masyarakat. Selain memberikan manfaat

administratif, program ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya identitas rumah sebagai bagian dari tertib administrasi dan pelayanan publik.

Meskipun demikian, program ini masih memiliki keterbatasan karena sistem identifikasi yang dibangun belum terintegrasi secara digital dengan basis data kependudukan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lanjutan berupa digitalisasi data identitas rumah dan integrasinya dengan Sistem Informasi Desa agar manfaat program dapat lebih optimal. Secara keseluruhan, Program ini mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan tata kelola pelayanan publik di tingkat desa serta berpotensi untuk di gunakan pada wilayah lain.

REFERENSI

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*. 14(4), 564–584.
- Fkun, E., Rihi, A., Naitili, J. B., Wangga, V. M., Taek, A., & Jehatut, F. B. (2026). Pendataan Kependudukan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Penguatan Administrasi Desa Umutnana Kabupaten Malaka. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1). <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/981>
- Insyira, A. D., & Purnamasari, H. (2024). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Jomin Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 155–165. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.22066>
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Mayasiana, N. A., Dwihendrawan, A., & Rohim. (2024). Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Smart Village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 5766–5774. <https://doi.org/doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4466>
- Mokalu, W. P., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(122), 40–47.
- Prabowo, A., Ishaq, D. M., Yofan, M., Soepandi, H., Dharmawan, R., Nugraha, R., Risnawaputra, Y. E., Wayan, N., Septiani, P., Lestari, M., Studi, P., Informatika, T., Gedong, K., Rebo, P., & Timur, J. (2024). Digital Sensus: Perancangan Sistem Informasi Layanan Desa berbasis WEB. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 05(02), 387–395. <https://jim.unindra.ac.id/index.php/jrami/article/view/11069/1711>
- Ramadhani, N. P., Lituhayu, D., & Widowati, N. (2024). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kantor Desa Sumberjo Kecamatan Remabang Kabupaten Rembang. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 70–80.
- Riko, D., & Marcus, R. D. (2023). Peningkatan pelayanan publik pemerintah desa melalui sistem informasi kependudukan berbasis web. *Journal of Information System and Application Development*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.26905/jisad.v1i1.9856>
- Sarman, Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 117–121. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.15301448>
- Yusika Riendy, Asip Suyadi, A. (2022). Peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat Desa Rawakalong. *BAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat – Universitas Pamulang*, 1(3), 481–487. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/baktihukum/article/view/12181>

Zahroh, L., Aryani, L., & Priyanti, E. (2026). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(1), 335-352.